

Pendidikan Arab Saudi: Tantangan dan Reformasi

Muhammad Hendra Yunal

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: 32190414883@students.uin-suska.ac.id

Abstrak

Arab Saudi sebagai salah satu negara terkaya di Timur Tengah mengalami pembaharuan di bidang pendidikan dari masa ke masa. Diawali oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz melalui slogan "free education for all" mendorong warganya untuk belajar melalui lembaga-lembaga pendidikan yang disediakan oleh pemerintah dan menyediakan program beasiswa bagi keluarga yang kurang mampu. Sampai pada masa Raja Abdullah bin Abd Aziz, anggaran pendidikan dialokasikan 27% dari total anggaran belanja Negara Arab Saudi. Para pemuda Arab Saudi diberikan beasiswa untuk belajar/kuliah ke luar negeri, seperti ke Amerika, Inggris, Australia, Jepang Malaysia dan negara-negara lainnya. Namun, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Arab Saudi ini dinilai belum menyentuh aspek fundamental terkait muatan kurikulum pendidikan yang mereka gunakan yang terkesan memberi ruang dan bibit subur bagi lahirnya radikalisme dan ekstrimisme, sehingga perlu direformasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pendidikan di Arab Saudi: berikut tantangan yang dihadapi dan reformasi yang dilakukan. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah studi pustaka (library reseach) melalui teknik pengumpulan data dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Temuan dalam penelitian ini menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Arab Saudi, seperti; menyusupnya paham-paham radikal di lembaga pendidikan agama dan makin menipisnya cadangan minyak bumi sebagai sumber utama pendapatan negara. Menyikapi tantangan tersebut, Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan reformis; Pertama, mereformasi sistem pendidikannya, mengakhiri ekstrimisme agama dan mengarah kepada moderasi dan toleransi. Kedua, transformasi sosio-ekonomi melalui program diversifikasi ekonomi dan juga turut mempengaruhi kebijakan di bidang sosial dan budaya.

Kata kunci: Pendidikan, Arab Saudi, Tantangan, Reformasi.

PENDAHULUAN

Pendidikan telah menjadi perhatian utama di Arab Saudi sejak negara ini diproklamirkan pada tanggal 23 September 1932, dan khususnya semenjak tahun 1954 ketika Kementerian Pendidikan dibentuk. Pembaharuan di bidang pendidikan telah dimulai pada masa Raja Faisal bin Abd Aziz (1964-1975) dan dilanjutkan oleh Raja Khalid bin Abd Aziz (1975-1982) dan Raja Fahd bin Abd Aziz (1982-2005). Pembaharuan yang tampak dan terasa diantaranya adalah disediakannya pendidikan bagi laki-laki dan perempuan mulai dari taman kanak-kanak sampai universitas. Mahasiswa diberi beasiswa untuk melanjutkan studi dan kuliah di universitas/institut Internasional. Orang tua siswa

yang kurang mampu membiayai sekolah anaknya dibantu oleh negara. Pemerintah Arab Saudi mengambil slogan *free education for all*.¹

Pada saat Raja Abdullah diangkat menjadi raja (2005-2015), beliau melanjutkan pembaruan yang dilakukan oleh para pendahulunya, terbukti pada awal tahun 2005 tidak ada satupun universitas di Arab Saudi yang masuk dalam rangking universitas dunia, namun pada tahun 2011 *King Saud University* yang nota benanya universitas tertua di Arab Saudi masuk dalam rangking 200 besar dunia (20 besar Asia). Hal ini tentu tidak lepas dari langkah pembaharuan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Raja Abdullah melalui peningkatan anggaran pendidikan yang mencapai 27% dari total anggaran belanja Arab Saudi. Raja Abdullah juga memberikan beasiswa kepada pemuda-pemudi Arab Saudi untuk belajar keluar negeri baik ke Barat maupun ke Timur, seperti; Amerika, Inggris, Australia, Jepang Malaysia dan negara-negara lainnya menjadi tujuan pemuda-pemuda Saudi untuk menuntut ilmu.²

Namun, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Arab Saudi ini dinilai belum menyentuh hal yang asasi terkait dengan isi (muatan) kurikulum yang dipakai. Ada anggapan bahwa kurikulum pendidikan yang mereka gunakan terkesan memberi ruang dan bibit subur bagi lahirnya radikalisme dan ekstrimisme, sehingga perlu direformasi. Sorotan Internasional bagi Arab Saudi untuk meninjau secara mendalam kebijakannya terjadi pasca serangan teroris 11 September 2001, dimana banyak warga Negara Arab Saudi terbukti terlibat dalam aksi mengejutkan itu. Peristiwa teror 11 September tersebut menjadi momentum bagi pihak Internasional menekan Arab Saudi untuk meninjau ulang kurikulum pendidikannya yang terkesan memberi media dan bibit subur bagi lahirnya radikalisme dan ekstrimisme yang berimplikasi kepada terorisme.³ Harapan dunia Internasional agar Pemerintah Arab Saudi mampu memfilter konten ujaran kebencian dan memasukkan konten-konten pendidikan yang lebih humanis dan moderat.

METODE

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan penelitian ini merupakan studi pustaka (*library reseach*), yaitu studi penelaahan dan kajian terhadap berbagi buku, literature-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah: topik yang dipecahkan.⁴ Kemudian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan baik berupa buku, jurnal, artikel, gambar atau elektronik yang bersedia guna memperoleh berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵ Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Tahapannya dimulai dengan melakukan reduksi data dari sumber kepustakaan, kemudian mengorganisasi dan memaparkan data, melakukan verifikasi kemudian diakhiri dengan menyimpulkan data untuk menjawab rumusan masalah.⁶

¹ Agustiar Syah Nur, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara* (Bandung: Lubuk Agung, 2001) h.41

² *Ibid.*, h.41

³ Md. Mudassir Quammar, *Education System in Saudi Arabia*, (Palgrave, Mcmillan, 2021) hal 7

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

⁵ Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

⁶ Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Kudus : Media Ilmu Press, 2015), h.2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Reformasi Pendidikan

Pendidikan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara diartikan sebagai “daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan karakter) pikiran (intellect), dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya”.⁷ Pandangan relatif sama dikemukakan oleh Azyumardi Azra, yang berpendapat “pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien”.⁸ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendidikan bertujuan untuk menumbuhkembangkan kepribadian dan intelektual siswa dalam rangka mempersiapkan siswa menghadapi dunia dan kehidupannya kelak.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Tantangan dalam arti “hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah; rangsangan (untuk bekerja lebih giat dan sebagainya)”.⁹ Prediksi para ahli, kedepannya tantangan “Megatrend 2045” akan terjadi meliputi; demografi dunia, urbanisasi global, kemajuan teknologi, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim, termasuk 17 item *sustainable development goals* sebagai efek dari revolusi industri 4.0 yang akan berdampak pada hilangnya pekerjaan dan diganti dengan otomatisasi, namun disisi lain akan terbuka pekerjaan baru.¹⁰

Oleh karena itu, dunia pendidikan mau tidak mau harus mempersiapkan keterampilan yang memadai dan kompetensi yang cukup untuk menghadapi tantangan tersebut. John Dewey, seperti yang dikutip oleh M. Arifin, menyatakan bahwa pendidikan merupakan “suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (*intelektual*) maupun daya perasaan (*emosional*) menuju ke arah alam dan sesama manusia”.¹¹ Sehingga dengan terbentuknya kemampuan dasar yang fundamental tersebut, diharapkan berbagai tantangan dapat teratasi.

Namun, untuk mewujudkan hal itu, sudah menjadi suatu keniscayaan bagi institusi pendidikan untuk berbenah dan berubah (reformasi) sesuai dengan tuntutan zaman. Perubahan yang dimaksud sebagai manifesto dari reformasi mengandung arti “perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, pendidikan atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara”.¹² Reformasi pendidikan tersebut bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau. Reformasi pendidikan meliputi empat bidang yaitu reformasi birokrasi, pemuliaan pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta reformasi sistem pembelajaran.¹³

Terdapat dua aspek yang menstimulasi lahirnya reformasi pendidikan, yakni (1) aspek internal seperti kualitas pendidikan yang diselenggarakan dan (2) aspek eksternal,

⁷ R. Siti Pupu Fauziah, *Pendidikan Karakter Berbasis Tauhid*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020) h. 13

⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Cet. II (Jakarta: Logos, 2000) h. 3

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tantangan> diakses pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 18.00 WIB

¹⁰ <https://www.uny.ac.id/id/berita/hadapi-tantangan-pendidikan-dalam-megatrend-2045> diakses pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 21:23

¹¹ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm. 1

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/reformasi> diakses pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 18.07 WIB

¹³ http://eprints.ums.ac.id/13182/2/BAB_I diakses pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 21:19

yakni tuntutan perubahan global yang memerlukan penyesuaian sistem pendidikan sehingga sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁴ Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa reformasi pendidikan memakan waktu yang lama dan terkadang tidak mungkin dapat dicapai secara penuh, namun hasil dan produk setiap fase atau periode tertentu dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

Pendidikan Arab Saudi

Sistem pendidikan Arab Saudi disorot oleh negara luar terutama oleh negara maju khususnya Amerika Serikat, sejak terjadinya pengeboman gedung *World Trade Centre* (WTC) pada tanggal 11 September 2001. Gedung (Menara Kembar) yang menjadi simbol kejayaan ekonomi kapitalis yang diusung oleh Amerika Serikat hancur lebur dihantam oleh dua pesawat komersial yang dibajak oleh teroris. Aksi terorisme ini diduga didalangi oleh Al-Qaidah pimpinan Osama bin Laden yang nota benenya adalah warga Negara Arab Saudi, sehingga membuat Arab Saudi secara tidak langsung tertuduh dalam aksi terorisme tersebut. Inilah masa-masa ujian tersulit bagi aliansi Saudi dan Amerika Serikat, karena 15 orang dari 19 para pelaku teroris berkebangsaan Saudi.¹⁶

Peristiwa teror 11 September ini dikaitkan dengan ekstrimisme dan terorisme yang sangat mengancam, dan ancaman ini meluas tidak hanya terhadap negara-negara barat tetapi juga bagi negara-negara lainnya. Aksi teror ini secara tidak langsung mereka kaitkan dengan pendidikan. Mereka melihat bahwa sistem pendidikan Arab Saudi turut membentuk pemikiran yang ekstrim tersebut. Situasi inilah akhirnya yang membuat Arab Saudi perlu melakukan modernisasi sistem pendidikannya, dari yang semula terkesan mengandung ekstrimisme agama mengarah kepada moderasi dan toleransi. Konten ekstrimisme dari buku-buku teks pembelajaran dihapus alias dihilangkan.

Ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Arab Saudi sejak 2015. Kebijakan yang dimaksud tidak terlepas dari Visi 2030 Arab Saudi itu sendiri. *Pertama*, reformasi sistem pendidikan Arab Saudi yang mengakhiri ekstrimisme agama dan mengarah kepada moderasi dan toleransi. Kurikulum baru tengah disusun dengan tujuan mendorong kebebasan berpikir dan toleransi di kalangan para siswa. Mata pelajaran yang diajarkan akan memungkinkan para siswa bisa menggunakan kemampuan berpikir kritis dalam berbagai situasi. Pengembangan kurikulum memasukkan proyek-proyek pendidikan baru yang mencakup mata pelajaran seperti filsafat dan pemikiran kritis. Sebagai bagian dari pengembangan kurikulum baru untuk sekolah menengah, Kementerian Pendidikan sudah menyelenggarakan berbagai lokakarya di lebih dari 100 sekolah menengah di Saudi. Disamping itu, Pemerintah Arab Saudi ingin mempercepat pengembangan kurikulum baru yang bisa memfilter konten ujaran kebencian dan memasukkan konten-konten pendidikan yang lebih humanis dan moderat.¹⁷

¹⁴ Muhammad Yaumi, *Reformasi Sistem Pendidikan di Indonesia: Suatu Refleksi Kritis Menuju Perbaikan Kualitas* (Fakultas tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar). hlm. 10-11

¹⁵ Zamroni, *Reformasi Pendidikan dari Pondasi ke Aksi* (JPI FIAI Jurusan Tarbiyah Vol. V, 1999) hlm. 29

¹⁶ Md. Mudassir Quammar, *Op.Cit.*, hal.7

¹⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54973191> diakses pada tanggal 24 November 2021 pukul 06.30 WIB.

Kedua, blue print dari Visi 2030 yang arahnya adalah transformasi sosio-ekonomi. Kekayaan sumber daya alam (minyak) beberapa negara Timur Tengah yang selama ini menopang hidup mereka, namun sumber daya alam semacam ini lama-kelamaan berkurang dan bahkan akan habis, sehingga beberapa negara ini termasuk Arab Saudi sudah mulai berpikir untuk memodernisasi sistem ekonomi mereka, dimana tidak hanya mengandalkan sumber daya alam semata.

Pangeran Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota Kerajaan Arab Saudi sejak 21 Juni 2017 menggantikan saudara sepupunya Pangeran Muhammad bin Nayef melakukan perubahan yang fundamental diberbagai aspek. Di bawah Program Nasional Visi 2030, Arab Saudi disebut-sebut semakin membuka diri pada kultur modern. Dengan dalih diversifikasi ekonomi, ternyata juga turut mempengaruhi sosial dan budayanya. Sejak menjabat sebagai putra mahkota atau pemimpin *de-fakto* Saudi, Muhammad bin Salman telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang membongkar kultur konservatif negara Islam itu, seperti: melonggarkan aturan berpakaian, membuka bioskop, mengizinkan konser musik, membuka taman hiburan.¹⁸ Disamping itu Muhammad bin Salman juga mengizinkan perempuan menyetir mobil, berpergian dan hidup sendiri tanpa didampingi wali laki-laki, mengganti nama tanpa seizin wali, bergabung/masuk militer, bahkan mengizinkan pakaian bikini di pantai.¹⁹

Arab Saudi ingin melakukan transformasi sosio-ekonomi dengan memodernisasi sistem pemerintahannya. Di bawah Visi 2030 tersebut, reformasi di bidang pendidikan dihadirkan sebagai sarana untuk melaksanakan reformasi ekonomi. Pemerintah di satu sisi berupaya untuk memperkenalkan konten modern kurikulum seperti sains, filsafat, musik dan bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan bahasa Cina yang akan membantu pemerintah kelak membangun ekonomi modern, dan di sisi lain dalam rangka untuk memerangi/menyingskirkan narasi ekstrimisme agama secara langsung.²⁰ Mereka melihat pendidikan menjadi pranata sosial yang berperan dalam mewujudkan hal itu. Jadi, bagaimana pendidikan dapat merelevansikan orientasi konten kurikulumnya dengan kebutuhan untuk mengembangkan sosio-ekonomi masyarakat seperti negara maju baik dibidang industri, perusahaan, bisnis dan lain-lain. Mereka harus bekal *human capitalnya*. Dengan demikian *human capital* merupakan investasi yang perlu mereka pertahankan dan mereka tingkatkan.

Manusia sebagai sumber daya untuk pembangunan disamping sumber daya alam tentunya, perlu mereka perkuat melalui pendidikan. Ada beberapa kebijakan yang akhirnya dirubah/direformasi. Peran perempuan yang selama ini kurang tampak, kemudian diberi peran yang lebih baik. Dalam masyarakat Saudi perempuan perlu belajar untuk berhubungan satu sama lain dan memperlakukan satu sama lain sebagai sumber

¹⁸<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4087688/6-kebijakan-radikal-pemerintah-arab-saudi-demi-gaet-turis-asing> diakses pada tanggal 24 November 2021 pukul 06.10 WIB.

¹⁹<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211119205749-120-723671/5-kebijakan-pangeran-mbs-yang-mendobrak-aturan-konservatif-arab-saudi> diakses pada tanggal 24 November 2021 pukul 05.45 WIB.

²⁰ Najah Al-Otaibi, *Vision 2030: Religious Education Reform in the Kingdom of Saudi Arabia (Special Report: 2020)* h. 7

pengetahuan.²¹ Disamping itu, pendidikan yang selama ini kurang menetapkan pendidikan wajib, akhirnya Arab Saudi menetapkan pendidikan wajib 12 tahun. Sebelumnya tidak ada penetapan pendidikan wajib 12 tahun, karena adanya keresahan mereka mengingat sebagian masyarakat Arab Saudi yang nomadik (berpindah-pindah) sehingga banyak juga diantara mereka yang tidak mendapatkan akses pendidikan secara baik. Namun, belakangan seiring dengan tantangan-tantangan di atas, Pemerintah Arab Saudi akhirnya menetapkan pendidikan wajib 12 tahun dan menjamin seluruh biaya pendidikan tersebut.

Selanjutnya persoalan integrasi ilmu, jika selama ini lebih banyak konsepnya kepada pendidikan agama, belakangan kita lihat kebijakan pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan Ilmu Agama dengan Ilmu Sains-Teknologi dan Sosial-Humaniora. Integrasi ilmu ini menjadi sesuatu hal yang amat menonjol di Arab Saudi. Penguasaan terhadap sains-teknologi ini membuat Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan mengirimkan pelajar-mahasiswa mereka kuliah ke luar negeri. Kebijakan ini telah diinisiasi oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz dan meningkat pada masa Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Raja Abdullah juga mengirimkan tenaga pengajar (guru dan dosen) ke Amerika untuk belajar sains dan manajemen.²²

Disamping itu, Pemerintah Arab Saudi juga mengeluarkan kebijakan reformasi seluruh perguruan tinggi mereka dengan cara *menghire* (menyewa) tenaga pengajar/dosen dari luar negeri, terutama dari Mesir, seperti Islamic University dari Madinah, dimana pada awal mulanya tenaga pengajarnya (dosen-dosen) mayoritas (98%) didatangkan/dikontrak dari Universitas Al-Azhar Kairo-Mesir. Kemudian terjadi transfer ilmu yang membuat Arab Saudi berkembang sendiri, sehingga sekarang tenaga pengajar dari Al-Azhar tersisa kurang dari 40%. Bahkan Raja Abdullah pernah mengundang ilmuwan-ilmuan dunia untuk berkiprah dan berpartisipasi dalam membangun SDM di Arab Saudi. Lebih dari 15 peraih Nobel dari berbagai bidang disiplin ilmu didatangkan dan dikontrol secara khusus oleh universitas-universitas di Arab Saudi untuk transfer ilmu pengetahuan.²³

Arab Saudi menyadari bahwa pendidikan adalah jawaban dari semua untuk menghadapi perkembangan dunia ini, *life skill* sangat diperlukan. Jika kebijakan sebelumnya pendekatannya lebih kepada tenaga pengajar (dosen/guru) dengan *menghire* (menyewa) tenaga pengajar dari luar negeri, tetapi belakangan kebijakan dari Pangeran Muhammad bin Salman lebih mengarah kepada reformasi institusi/lembaga dan sistem pendidikannya.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Arab Saudi mengalami pembaharuan dari masa ke masa. Ditangan Raja Faisal Ibn Abd Aziz pembaharuan dibidang pendidikan mulai diterapkan. Melalui program beasiswa mahasiswa didorong untuk melanjutkan studi/kuliah di universitas/institut Internasional. Selanjutnya pada masa Raja Abdullah, disamping anggaran pendidikan dialokasikan 27% dari total anggaran belanja Negara Arab Saudi, sama dengan pendahulunya, beliau juga memberikan beasiswa bagi para pemuda-pemudi

²¹ Amani Hamdan, *Women and education in Saudi Arabia: Challenges and achievements*, (*International Education Journal*, 2005) h. 46

²² Agustiar Syah Nur, *Op. Cit.*, h. 41

²³ *Ibid.*, h.41

Arab Saudi untuk belajar keluar negeri. Kemudian pada masa Raja Salman bin Abdul Aziz, beliau tetap mempertahankan kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pendahulunya. Akhirnya, di tangan Pangeran Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, perubahan yang fundamentalis dan drastis diberbagai aspek dilakukan, termasuk di bidang pendidikan. Di bawah Program Nasional Visi 2030, kurikulum baru disusun dengan tujuan mendorong kebebasan berpikir, moderasi dan toleransi di kalangan para pelajar/mahasiswa. Mata pelajaran yang diajarkan akan memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir kritis dalam berbagai situasi. Disamping itu transformasi sosio-ekonomi dilakukan melalui program diversifikasi ekonomi dan ternyata juga turut mempengaruhi kebijakan beliau di bidang sosial dan budaya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akrim, (2020) *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara)
- Al- Otaibi, Najah. (2020) *Vision 2030: Religious Education Reform in the Kingdom of Saudi Arabia (Special Refort)*
- Arifin, M. (2000) *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara)
- Arikunto, Suharsimi. (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Azra, Azyumardi. (2000) *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Cet. II (Jakarta: Logos)
- Fauziah, R. Siti Pupu. (2020) *Pendidikan Karakter Berbasis Tauhid*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada)
- Hamdan, Amani. (2005) *Women and education in Saudi Arabia:Challenges and achievements*, (*International Education Journal: Shannon Research Press*)
- Masrukhin, (2015) *Metode Penelitian Kualitatif* (Kudus : Media Ilmu Press)
- Nasir, (2005) *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Nur, Agustiar Syah. (2001) *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara* (Bandung: Lubuk Agung)
- Quammar, Md. Mudassir. (2021) *Education System in Saudi Arabia*, (Palgrave, Mcmillan)
- Salam, Burhanuddin. (1997), *Pengantar Pedagogik (Dasar-Dasar Ilmu Mendidik)*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Yaumi, Muhammad. *Reformasi Sistem Pendidikan di Indonesia: Suatu Refleksi Kritis Menuju Perbaikan Kualitas* (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar)
- Zamroni, (1999) *Reformasi Pendidikan dari Pondasi ke Aksi* (JPI FIAI Jurusan Tarbiyah Vol. V)

<https://www.uny.ac.id/id/berita/hadapi-tantangan-pendidikan-dalam-megatrend-2045>

diakses pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 21:23

http://eprints.ums.ac.id/13182/2/BAB_I diakses pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 21:19

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tantangan> diakses pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 18.00 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/reformasi> diakses pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 18.07 WIB.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54973191> diakses pada tanggal 24 November 2021 pukul 06.30 WIB.

<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4087688/6-kebijakan-radikal-pemerintah-arab-saudi-demi-gaet-turis-asing> diakses pada tanggal 24 November 2021 pukul 06.10 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211119205749-120-723671/5-kebijakan-pangeran-mbs-yang-mendobrak-aturan-konservatif-arab-saudi> diakses pada tanggal 24 November 2021 pukul 05.45 WIB.